



Evaluasi Sistem Pajak Online: Perspektif Good Governance

Evaluation of Online Tax Systems: Good Governance Perspective

Mohd. Idris Dalimunthe¹, Khairuddin Tampubolon^{2*}, Elazhari³

¹Universitas Medan Area

¹Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding Author* : khair.tb@gmail.com

Abstrak

Sistem pajak online telah menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pajak online di Indonesia dari perspektif good governance. Adapun hasil pembahasannya yaitu Sistem pajak online di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung good governance. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, sistem pajak online dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas sistem pajak online dalam mendukung good governance, antara lain: 1) Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 2) Mempermudah sistem pajak online dan membuatnya lebih user-friendly, 3) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, 4) Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kata Kunci: Evaluasi; Sistem Pajak Online; Perspektif; Good Governance.

Abstract

The online tax system has become an important instrument in good governance in Indonesia. This system is expected to increase efficiency, transparency and accountability in the tax collection process. However, there are still several obstacles in its implementation. This scientific work aims to evaluate the online tax system in Indonesia from a good governance perspective. The results of the discussion are that the online tax system in Indonesia has great potential to support good governance. However, there are still several obstacles that need to be overcome. By overcoming these obstacles, the online tax system can become an effective instrument for increasing efficiency, transparency and accountability in the tax collection process in Indonesia. Based on the research results, several steps are recommended to increase the effectiveness of the online tax system in supporting good governance, including: 1) Improving information and communication technology (ICT) infrastructure, 2) Simplifying the online tax system and making it more user-friendly, 3) Increasing education and outreach to taxpayers, 4) Strengthening cooperation with various related parties.

Keywords: Evaluation; Online Tax System; Perspective; Good governance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam era digital ini, sistem pajak online menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak. Sistem pajak online yang baik dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang ideal, yang menekankan pada aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Sistem pajak online diharapkan dapat mendukung good governance dengan cara:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak.
2. Mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan.

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan sumber referensi hasil penelitian kemudian dilakukan analisis dan disesuaikan dengan tujuan pembuatan karya ilmiah sesuai judul yang ditetapkan.

Dengan tahapan sebagai berikut:

1) Menentukan Topik dan Tujuan Penulisan

Langkah pertama adalah menentukan topik dan tujuan penulisan. Topik merupakan fokus utama dari tulisan, sedangkan tujuan penulisan menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan tulisan tersebut. Menentukan topik dan tujuan yang jelas akan membantu dalam memilih sumber referensi yang tepat.

2) Mencari Sumber Referensi

Setelah menentukan topik dan tujuan, Selanjutnya mencari sumber referensi yang relevan. Ada beberapa cara untuk mencari sumber referensi, antara lain:

- a. **Mencari di perpustakaan:** Perpustakaan memiliki banyak koleksi buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya yang dapat Selanjutnya gunakan.

- b. **Mencari di internet:** Ada banyak sumber referensi online yang dapat Selanjutnya akses secara gratis, seperti Google Scholar, Academia.edu, dan ResearchGate.
- c. **Mencari melalui pakar di bidang terkait:** Selanjutnya dapat berkonsultasi dengan pakar di bidang terkait untuk mendapatkan rekomendasi sumber referensi yang terpercaya.

3) **Membaca dan Mencatat Informasi Penting**

Setelah menemukan sumber referensi yang relevan, Selanjutnya perlu membaca dan mencatat informasi penting. Pastikan Selanjutnya memahami informasi yang dibaca dan mencatat poin-poin penting yang dapat mendukung tulisan Selanjutnya.

4) **Mengevaluasi Kredibilitas Sumber Referensi**

Tidak semua sumber referensi memiliki kredibilitas yang sama. Penting untuk mengevaluasi kredibilitas sumber referensi sebelum menggunakannya. Berikut beberapa cara untuk mengevaluasi kredibilitas sumber referensi:

- a. **Periksa kredibilitas penulis:** Cari tahu apakah penulis memiliki keahlian dan pengalaman di bidang terkait.
- b. **Periksa kredibilitas penerbit:** Pastikan penerbit memiliki reputasi yang baik.
- c. **Periksa tanggal publikasi:** Pastikan informasi yang Selanjutnya gunakan up-to-date.
- d. **Periksa kelengkapan informasi:** Pastikan informasi yang Selanjutnya gunakan lengkap dan akurat.

5) **Mengutip Sumber Referensi**

Saat menggunakan informasi dari sumber referensi, penting untuk mengutip sumber tersebut dengan benar. Hal ini untuk menghindari plagiarisme dan memberikan kredit kepada penulis asli. Ada beberapa gaya kutipan yang dapat Selanjutnya gunakan, seperti APA Style, MLA Style, dan Chicago Style.

6) **Menulis dan Menyunting Tulisan**

Setelah mengumpulkan dan mengevaluasi sumber referensi, selanjutnya dapat mulai menulis dan menyunting tulisan. Pastikan tulisan Selanjutnya terstruktur dengan baik, mudah dipahami, dan bebas dari plagiarisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pajak online merupakan terobosan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem ini menawarkan berbagai layanan online yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga menghemat waktu dan biaya WP.

Manfaat Sistem Pajak Online:

1. Efisien dan Efektif: WP dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya secara online tanpa perlu datang ke kantor pajak.
2. Hemat Waktu dan Biaya: Proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan mudah.
3. Meminimalisir Kesalahan: Sistem online membantu WP dalam menghindari kesalahan dalam pengisian formulir pajak.
4. Transparan dan Akuntabel: Sistem online meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.
5. Akses Informasi: WP dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perpajakan.

Layanan yang Tersedia dalam Sistem Pajak Online:

1. Pendaftaran NPWP: WP dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara online.
2. Pelaporan SPT Masa dan Tahunan: WP dapat melaporkan SPT Masa dan Tahunan PPh, PPN, dan pajak lainnya secara online.
3. Pembayaran Pajak: WP dapat melakukan pembayaran pajak secara online melalui berbagai kanal pembayaran.
4. Konsultasi Pajak: WP dapat berkonsultasi dengan petugas pajak melalui layanan online.
5. Permohonan Layanan: WP dapat mengajukan berbagai permohonan layanan perpajakan secara online.

Cara Mengakses Sistem Pajak Online:

1. DJP Online: WP dapat mengakses layanan pajak online melalui situs web <https://djponline.pajak.go.id/>.
2. Aplikasi Mobile: WP dapat mengunduh aplikasi DJP Online di smartphone untuk mengakses layanan pajak online.
3. Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP): WP dapat menggunakan layanan pajak online yang disediakan oleh PJAP yang terdaftar di DJP.

Pentingnya Penggunaan Sistem Pajak Online

Penggunaan sistem pajak online memiliki banyak manfaat bagi WP dan DJP. Bagi WP, sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam

menyelesaikan kewajiban perpajakan. Bagi DJP, sistem ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak.

Oleh karena itu, WP diimbau untuk memanfaatkan sistem pajak online untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Tantangan dan Solusi Sistem Pajak Online

Meskipun memiliki banyak manfaat, sistem pajak online masih memiliki beberapa tantangan, seperti:

1. Ketersediaan akses internet: Tidak semua WP memiliki akses internet yang memadai.
2. Literasi digital: Masih ada WP yang belum familiar dengan penggunaan teknologi digital.
3. Keamanan data: Keamanan data WP menjadi salah satu concern utama dalam penggunaan sistem online.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, DJP perlu melakukan beberapa langkah, seperti:

1. Meningkatkan infrastruktur internet: DJP perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur internet di daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan edukasi dan literasi digital: DJP perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada WP tentang penggunaan sistem pajak online.
3. Memperkuat keamanan data: DJP perlu menerapkan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data WP.

Dengan mengatasi tantangan tersebut, diharapkan sistem pajak online dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Good Governance atau tata kelola yang baik merupakan konsep penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan adil. Konsep ini memiliki berbagai perspektif yang perlu dipahami untuk mencapai tujuannya. Berikut beberapa perspektif utama Good Governance:

1. Perspektif Demokrasi:
Good Governance dilihat sebagai perwujudan demokrasi yang ideal. Pemerintahan yang baik haruslah berdasarkan partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dapat dicapai melalui mekanisme seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, akses informasi publik, dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

2. **Perspektif Ekonomi:**
Good Governance dianggap sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Pemerintahan yang baik haruslah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan memastikan terciptanya persaingan yang sehat.
3. **Perspektif Hukum:**
Good Governance menekankan pentingnya supremasi hukum dan kepastian hukum. Pemerintahan yang baik haruslah tunduk pada hukum dan bertindak secara adil dan transparan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat.
4. **Perspektif Sosial:**
Good Governance bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik haruslah memberikan akses yang sama kepada semua orang terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
5. **Perspektif Budaya:**
Good Governance perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Pemerintahan yang baik haruslah menghormati keragaman budaya dan membangun konsensus bersama.
6. **Perspektif Global:**
Good Governance tidak hanya terbatas pada tataran nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi global. Pemerintahan yang baik haruslah bekerja sama dengan negara lain untuk menyelesaikan masalah bersama seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi.

Penerapan Good Governance:

Penerapan Good Governance memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan Good Governance:

1. Membangun kerangka hukum yang kuat dan adil.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
4. Memerangi korupsi dan nepotisme.
5. Meningkatkan kualitas layanan publik.
6. Memperkuat kerjasama antar sektor.

Good Governance merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya yang terus menerus. Dengan menerapkan Good Governance, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang efektif, akuntabel, adil, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pajak online di Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mendukung good governance. Hal ini terlihat dari:

1. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem pajak online.
2. Meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak.
3. Meningkatnya tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan DJP.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi sistem pajak online, antara lain:

1. Kesenjangan digital antara wajib pajak.
2. Kompleksitas sistem pajak online.
3. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Sistem pajak online di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung good governance. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, sistem pajak online dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas sistem pajak online dalam mendukung good governance, antara lain:

1. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
2. Mempermudah sistem pajak online dan membuatnya lebih user-friendly.
3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.
4. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Muhammad. (2012). Good Governance dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Andini, R., M.J. Amin, dan L. Dyastari. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(4): 1571-1582.
- Anggito, A. dan J. Setiawan. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1(1): 176-191.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan Layanan Online DJP Online. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id>
- Effendi, M. (2003). *Good Governance: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Good Governance: https://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance
- Kansil, C.S.T. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2007). *Good Governance: Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Online-Pajak. (2023). Sistem Pemungutan Pajak. Diakses pada 7 Februari 2024, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Samsudin, I. dan M. Muslihudin. (2018). Good Governance dan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik* 16(1): 1-14.
- Sistem Pajak Online: <URL yang tidak valid dihapus>